

DESAKRALISASI KIAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

JAWA TIMUR 2018

Studi di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)



ROBETH SAIFUN NAWAS

NIM: E04213090

Pembimbing :

ZAKY ISMAIL, M. Si

NIP: 198212302011011007

PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya .

Nama : Robeth Saifun Nawas

NIM : E04213090

Jurusan : Filsafat Politik Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,
Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number BDAK0252098097.

Robeth Saifun Nawas
NIM : E04213090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Robeth Salfun Nawas* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 4 April 2019

Pembimbing



Zaky Ismail, M. SI
NIP: 198212302011011007

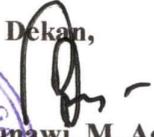
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Robeth Saifun Nawas telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,




Dr. Kumawi, M. Ag.,

NIP. 196409181992031002

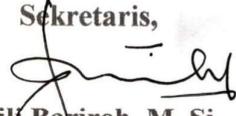
Fim Penguji:

Ketua,


Zaky Ismail, M. SI

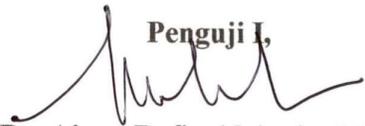
NIP. 198212302011011007

Sekretaris,


Laili Bariroh, M. Si

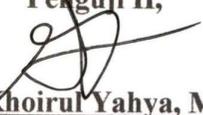
NIP. 197741032009122002

Penguji I,


Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M. Ag

NIP. 1972062522005011007

Penguji II,


Dr. Khoirul Yahya, M. Si

NIP. 197202062007101003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROBETH SAIFUN NAWAS
NIM : E04213090
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Filsafat Politik Islam
E-mail address : robethsaja@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

DESAKRALISASI KIAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018

Studi di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(ROBETH SAIFUN NAWAS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena Desakralisasi Politik Kiai dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, Studi Kasus Kiai Abdul Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pertanyaan penelitian ini adalah membahas mengapa masyarakat Desa Banjarwati banyak yang berbeda pilihan dengan Kiai Abdul Ghofur dan Bagaimana perspektif masyarakat terhadap anjuran kiai dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional dan teori komunikasi politik. Dalam penelitian ini teori pilihan rasional digunakan sebagai alat analisis dalam mengklasifikasikan masyarakat Desa Banjarwati pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, unsur pemerintah dan juga masyarakat Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cenderung memiliki pola pikir sesuai kesadaran mereka masing-masing, seperti hasil data yang terungkap bahwa masyarakat tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada seorang kiai, mereka tetap berlandaskan asas pilihan rasionalnya untuk menentukan calon pemimpin di Jawa timur tahun 2018. (2) perspektif masyarakat terhadap anjuran kiai dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 adalah mereka tetap memilih sesuai dengan pendiriannya dan hati nurani mereka masing-masing. Namun mereka tetap menghormati anjuran kiai, dan tidak melakukan tindakan yang dapat melecehkan atau membully kiai, dan juga tidak membanding-bandingkan kiai yang mendukung paslon yang berbeda.

Kata Kunci: Desakralisasi Politik Kiai, Strategi Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Kerangka Teori.....	23
H. Metode Penelitian.....	26
I. Teknik Analisis Data.....	30
J. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI	32
A. Teori Pilihan Rasional.....	32
B. Teori Komunikasi Politik.....	35
BAB III SETTING PENELITIAN.....	44
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	44
1. Kondisi Geografis Desa Banjarwati	44
2. Kondisi Demografis Desa Banjarwati	45
B. Dinamika Politik Desa Banjarwati.....	49

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Penyajian Data	55
1. Posisi Kiai Abdul Gofur ditengah Masyarakat Banjarwati	55
B. Analisis Data	59
1. Perbedaan Pilihan Masyarakat Banjarwati.....	59
2. Perspektif Masyarakat Terhadap Anjuran Kiai	65
3. Desakralisasi Politik Kiai Dalam Masyarakat Banjarwati	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kiai ditengah masyarakat memiliki pengaruh yang besar. Secara umum, kiai diyakini mempunyai kelebihan luar biasa sehingga kepemimpinannya diakui. Hal ini tentu tidak terlepas dari teks keagamaan yang membuat posisinya sebagai ahli dalam bidang agama. Sebutan kiai umumnya digunakan masyarakat Jawa untuk menyebut seseorang ditengah iradisi masyarakat muslim. Kiai juga mempunyai kharisma dalam memimpin sebuah pesantren, pada saat mengajarkan kitab-kitab klasik (Kitab Kuning) dan atau memiliki keterikatan dengan kelompok Islam Tradisional.¹

Mayoritas masyarakat Islam tradisional di Jawa, Kyai yang menjadi pengasuh pondok pesantren dianggap sebagai figur penting yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak (the absolute power and authority). Kedudukan yang dipegang Kyai adalah kedudukan ganda, yakni sebagai pengasuh dan pemilik pesantren. Kehidupan di pesantren yang diwarnai oleh asketisme dan kesediaan melakukan segala perintah Kyai guna memperoleh barokahnya, tentu saja memberikan bekas yang mendalam pada jiwa seorang santri, dan bekas inilah yang pada gilirannya nanti akan membentuk sikap hidupnya.

¹ Suprayogo, Imam, *Kyaidan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, (UIN Malang Press, 2009), hal 1

Dewasa ini, perputaran politik dalam negeri menunjukkan adanya fenomena yang menarik, bahwa keikutsertaan kiai pada politik praktis adalah kenyataan politik yang sedang berlangsung dan terjadi sedari tingkatan nasional sampai daerah, saat ini keikutsertaan kiai dalam politik bisa diidentifikasi melalui banyaknya kiai yang ada dalam pengurus partai, apalagi partai yang berideologi agama, atau partai yang membawa semangat keagamaan Islam.

Keterlibatan kiai dengan politik praktis di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, menilik layak atau tidak mereka terlibat dalam politik praktis, ada yang berpendapat jika kiai itu idelanya sebagai pengayom umat saja, karena itu lebih baik jika menjauhi kegiatan politik. Dan itu sebaliknya, ada yang berpendapat lain yang mengutarakan jika tidak ada alibi kiai wajib menjauhi politik praktis, karena berpolitik adalah bagian kehidupan agama itu sendiri.²

Kiai dalam politik praktis, sampai sejauh ini memang terjadi tarikmenarik pendapat, antara kelompok yang mengabsahkan kiai berpolitik dengan kelompok yang menentang dengan keras kiai terlibat dalam politik. Kelompok pertama mengasumsikan bahwa kiai bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik seperti halnya warga negara yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua mengkritik dengan keras, berdasarkan asumsi bahwa keterlibatan kiai dalam politik lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan yang bisa didapatkan. Hal ini

² Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik*, (UIN Malang Press, 2007), hal 3

berkaitan dengan realitas politik yang oleh banyak kalangan dianggap "kotor". Sehingga ketika kiai dan pesantren terlibat dalam politik akan terseret kedalam dunia yang "kotor" pula.³

Dalam pemilu, banyak dari warga desa memilih partai politik atau calon kepala daerah bukan dari hati nuraninya, tetapi dari anjuran seorang kiai. Saat memilih partai politik atau calon kepala daerah yang di dalamnya ada nama kiai yang mereka hormati bukan berasal dari kepercayaan rasional, melainkan kepercayaan irasional, dengan kata lain apa yang dilakukan kiai cenderung diikuti oleh pengikutnya.⁴

Terdapat berbagai ragam peran politik yang dilakukan oleh para kiai di Jawa Timur dalam mendukung dan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur disekitar lingkungannya, Khususnya di kalangan santri dan masyarakat sekitarnya, karena menganggap memilih Gubernur adalah urusan agama, demikian yang terjadi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur, sejumlah kiai melibatkan dirinya sebagai pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam hal ini para kiai yang tergabung dalam forum 21 kiai sepuh resmi mendukung pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno.⁵

Dukungan dari kiai dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur ini juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Kiai Abdul Ghofur sebagai tokoh yang berpengaruh dalam Verpolitikan di Kabupaten Lamongan, dengan basis santri

³ H. Sadi, Khazanah Pendidikan, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016)

⁴ Nurudin, Pengantar Komunikasi, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Pres 2005), h 172

⁵ www.Detik.com diakses pada tanggal 06 Januari 2019

dan massa yang tersebar di penjuru Kabupaten Lamongan diharap mampu menang mudah atas lawan politiknya (pasangan Khofifah-Emil).

Dalam komunikasi politiknya, Kiai Abdul Ghofur melakukan dakwah sebagai media komunikasinya. Adanya tv swasta dan saluran radio yang dimiliki Pondok Pesantren Sunan Drajat menjadi salah satu alat menyampaikan pesan kepada masyarakat, menjadikan halaqoh dan pengajian sebagai wadah mengakomodir massa. Artinya melalui forum tersebut kiai berupaya menggalang suara dan membangun kekuatan politik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

Namun, berdasarkan hasil penghitungan suara di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pasangan Gus Ipul-Mbak Puti yang didukung penuh oleh Kiai Abdul Ghofur hanya mendapat suara sebanyak 35% dari 4,216 daftar pemilih tetap.⁶

Hal ini merupakan fenomena yang menarik, karena sebelumnya peran Kiai Abdul Ghofur dalam pertarungan politik di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat memperoleh suara yang unggul. Seperti Pemilu, Pilpres, pilkades, pileg dan atau Pemilihan Gubernur, dipengaruhi oleh elit agama. Dalam hal ini dimaksud adalah keberadaan Kiai Abdul Ghofur yang dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat Banjarwati. Fenomena ini terjadi setiap pemilihan kepala desa, tercatat pada tahun 2009 dan tahun 2015 dukungan dari Kiai Abdul Ghofur- dapat menentukan hasil suara terakhir

⁶ <https://infopemiiu.kpu.go.id> KPU Kabupaten Lamongan - Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 diakses 07 Desember 2018

pemilihan. Bahkan dalam fenomena pilkada Jawa Timur pada tahun 2014, bahwa dukungan Kiai Abdul Ghofur kepada pasangan Soekarwo-Gus Ipul dapat unggul dari pasangan Khofifah-Herman.

Hal inilah yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul "DESAKRALISASI POLITIK KIAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018" Studi Kasus Kiai Abdul Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana sikap masyarakat Desa Banjarwati Kecamatan Paciran, terhadap komunikasi politik Kiai Abdul Ghofur, sebagai kiai yang mempunyai pengaruh dalam pelpolitikan di Kabupaten Lamongan, sebagai mesin politik pemenangan Gus Ipul dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah mengenai bagaimana masyarakat Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dulunya sangat patuh terhadap Kiainya, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Banjarwati Paciran Lamongan banyak yang berbeda pilihan politik dengan Kyai pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ?
2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap anjuran Kyai dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperoleh manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Untuk mencari tahu apa yang menjadi motivasi perbedaan dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif masyarakat terhadap anjuran kiai untuk menentukan pilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari problematika dan tujuan tertulis, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.
 - b) Memperbanyak literasi dan juga bahan referensi ilmu politik dengan usaha pengembangan keilmuan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai syarat guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Saungana Strata Satu.
 - b) Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam bidang pendidikan.
 - c) Diharap penelitian ini mampu membantu untuk mengetahui problematika yang berkaitan dengan informasi dan wawasan tentang Kiai Politik.

E. Definisi Konseptual

1. DESAKRALISASI

a. Definisi Desakralisasi

1) Definisi Etimologi

Secara bahasa, desakralisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *desacralisation* yang bermakna upaya penghapusan kesakralan.⁷

2) Definisi Terminologi

Secara istilah Nurcholish Madjid mendefinisikan desakralisasi sebagai pencopotan ketabuan dan kesakralan dari objek-objek yang semestinya tidak tabu dan tidak sakral.⁸

b. Konsep Desakralisasi Kiai

Pada dasarnya, peneliti mengalami kesulitan dalam mencari referensi mengenai konsep desakralisasi kiai, dikarenakan satusatunya ulama' kontemporer yang pernah menulis mengenai konsep desakralisasi ialah Nasr Hamid Abu Zayd dengan konsep desakralisasi Al-Qur'an yang telah beliau paparkan melalui teori Al-Qur'an sebagai produk budaya dengan menggunakan pendekatan analisis teks dan tafsir hermeneutikanya.⁹ Oleh sebab itu, peneliti akan memberikan bangunan konsepsi mengenai desakralisasi kiai yang peneliti pahami dari pengkolaborasi beberapa pemikiran tokoh yakni Emile Durkheim, Anthony Giddens dan Kiai A. C. Dhofir Zuhry.

⁷ A. Partanto, Pius., Kamus Ilmiah populer (Surabaya: Arkola, 2001), h. 104

⁸ Madjid, Nurcholish., Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 12

⁹ Husaini, Adian dan Abdurrahman al-Baghdadi., Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.36

Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul *The Elementary Forms Of The Religious Life* menyatakan bahwasanya ide tentang masyarakat adalah roh agama.¹⁰ Oleh sebab itu, jika kita ingin memahami sebuah struktur, interaksi dan institusi sosial masyarakat maka pahami bagaimana agama yang mereka anut mengatur hal tersebut. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya begitu besar peranan kiai terhadap masyarakat dan begitu besar penghormatan masyarakat terhadap kiai juga tidak terlepas dari peranan agama dalam Inelnbanguh konsep moralitas dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Namun, apabila kita lebih detail dalam Inenggunakan lensa pengamatan kita pada konteks relevansi pilihan politik masyarakat dengan kiai maka kita tidak dapat menggunakan pandangan dari Enlile Durkheim karena tidak dapat kita temukan konsep baku mengenai taqlid buta dalam konteks ijtihad politik kiai di dalana Islam.

Dalam konteks relevansi pilihan politik masyarakat dengan kiai kita..dapat memahami jalan rasionya dari pemikiran Anthony Giddens mengenai dominasi agen dalam membangun struktur sosial.¹¹ Menurut Giddens struktur sosial dilatarbelakangi oleh *human agency*. Kemudian sebuah peraturan akan mempengaruhi sebuah prilaku maupun tindakan manusia dan perilaku yang kemudian dilembagakan akan membentuk sebuah struktur tindakan sosial dan struktur-struktur yang terus

¹⁰ PaIs, L. Daniel,. *Seven Theories of Religion* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 129

¹¹ Ritzer George dan Douglas J. Goodman.. *Teori Sosiologi* (Bantul: KREASI WACANA, 2011), h. 609

diproduksi oleh manusia melalui tindakannya akan melahirkan sebuah sistem sosial. Menurut Giddens proses reproduksi struktur hingga menjadi sebuah sistem sosial itulah yang dinamakan sebagai strukturasi dan strukturasi erat hubungannya dengan *human agency*.

Selanjutnya Giddens memberikan tiga indikator pokok dalam strukturasi, yakni:¹²

- 1) Struktur penandaan atau signifikasi yang menyangkut skema simbol, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Di sini kita dapat memahami bahwa adanya simbol-simbol baru dalam penyebutan masyarakat terhadap suatu objek maupun subjek seperti kata kiai untuk seorang yang alim, sholeh dan memiliki pesantren, santri untuk seorang murid yang belajar di pesantren, dan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam merupakan bagian dari upaya strukturasi dan rekontruksi sebuah sistem sosial. Kenapa dimunculkan simbol kiai, santri dan pesantren? Apakah tidak cukup panggilan ustadz atau ulama', tilmidz atau murid. nla.nhajul islamiyyah atau lembaga pendidikan islam? apa latar belakang pemunculan simbol kiai, santri dan pesantren tersebut?
- 2) Struktur dominasi atau penguasaan. hal ini menyangkut penguasaan dalam konteks politik maupun ekonomi. Dalam konteks struktur dominâsi atau penguasaan di dalam pesântren jelas Inen-uju pada kiai sebagai penguasa mutlak pesantren, sehingga muncul sebuah

¹² Salam Abdus., Pengantar Sosiologi (Mafang: Dream Letera Buana, 2015), h. 160

dogma pesantren yang menyatakan bahwa *santri kudu manut dawuhe kiai*. Apakah islam mengajarkan hal tersebut? Apakah kiai selamanya tidak akan memiliki syahwat duniawi terutama syahwat politik? Haruskah setiap santri juga bertaqlid pada pilihan politik kiai?

- 3) Struktur pembenaran atau legitimasi yang berkaitan dengan peraturan normatif dalam tata hukum. Indikator ketiga inilah yang menjadi sebuah solusi terhadap seinua pertanyaan yang peneliti suguhkan dalam indikator pertama dan kedua. Setiap pesantren pasti memiliki norma hukum yang tertulis (peraturan pesantren) dan hukum yang tidak tertulis (budaya pesantren) dari adanya hukum tersebutlah tindakan sosial bergerak dengan terorganisir menuju satu tujuan. Namun, tujuan tersebutlah yang masih perlu di pertanyakan, yakni menuju kepada kemaslahatan pesantren atau kemaslahatan kiai?

Apakah semua sistem sosial dalam lingkungan pesantren yang menjadikan kiai sebagai *human agency* merupakan sebuah sistem sosial yang sudah final? Yang memiliki kepastian dampak positive dari konsekwensi logis apabila masyarakat melaksanakan senuta perintah kiai?

Disinilah Klai Ach. Dhofir Zuhr: memberikan sumbangsih pemikirannya, menurut beliau kiai adalah pialang kebudayaan (*cultural broker*) bukan pialang politik (*political broken*). Kemudian

tugas seorang kiai idealnya adalah menjadi seniirian rohani yang bergerak untuk mendapati kebahagiaan hakiki dengan jalan mengelola seni, ilmu dan "jalan sunyi" dari gaduhnya politik dan hiruk-pikuk kekuasaan. Kiai sejatinya bukanlah mamisia yang kegiatan intinya adalah untuk mengejar tujuan pragmatis-oportunis. Kiai menolak gairah politik busuk dan komersialisasi ayat-ayat suci.¹³

Dengan demikian tugas seorang kiai idealnya adalah untuk menjaga jarak dari struktur kekuasaan. Bukan membangun sebuah struktur politik pesantren yang difungsikan sebagai *power of politic* yang ditujukan untuk mendapati peran inapun posisi untuk dirinya dalam struktur kekuasaan politik praktis sebagaimana fenomena yang terjadi di indonesia beberapa dekade belakangan ini.

Kiai Ach. Dhofir Zuhri mendefinisikan kiai sebagai sebuah status sosial dalam kehidupan sosio-kemasyarakatan untuk seorang ulama.¹⁴

Namun beliau tidak membedakan tipologi gerakan kiai sebagaimana Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan Endang Turimidi yang memberikan penamaan terhadap kiai yang discsuitakan dengan tipologi gerakannya.

Dalam karyanya yang berjudul peradaban sarung Kiai Ach. Dhofir Zuhri berusaha melakukan desaklarisasi terhadap peran kiai dalam panggung politik. Beliau mencita-citakan agar para kiai fokus unluk menjadi- pribadi sebagaimana pribadi yang digambarkan oleh Sayyid.

¹³ Ach. Dhohir Zuhri, Peradaban Sarung (Jakarta: Gramedia, 2018), h.74

¹⁴ Ach. Dhohir Zuhri, Peradaban Sarung (Jakarta: Gramedia, 2018), h.126

Abdullah Bin Alawi Al Hadad dalam kitabnya yang berjudul an-Nashaihud Diniyyah.¹⁵

Kemudian Kiai Dhofir juga menyetujui pendapat dari Pramoedya Ananta Toer yang menyatakan bahwasanya seorang yang terpelajar harus berlaku adil, bahkan sejak dalam pikiran.¹⁶ Oleh sebab itu, kiai harus bersetia pada etika pengetahuan dan moralitas kemanusiaan. Dalam konteks politik kiai dan umat adalah agen perubahan yang memiliki modal kehidupan sama, oleh sebab itu kiai dan umat harus menyediakan dirinya untuk saling belajar dan bekerja sama. Dengan menyadari peta hubungan dan model kerjasama berbagai aktor, maka kiai dan umat akan mampu menentukan peran-peran yang akan dipilih apabila terjadi peristiwa politik tanpa adanya sikap mendiskreditkan masyarakat dan menebar dogma masyarakat harus *manut dawuhe kiai* dalam Seagal bidang, termasuk bidang politik.

Oleh sebab itu peneliti mendefinisikan desakralisasi sebagai upaya sekulerisasi nilai-nilai kesakralan terhadap segala sesuatu yang tidak tabu atau tidak sakral.

2. KYAI

a. Pengertian Kyai

¹⁵ Ibid, h.65

¹⁶ Ibid, h. 75

Kyai merupakan seseorang yang mempunyai ilmu agama (Islam), amal dan akhlak yang sesuai dengan bidangnya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “kiai adalah tokoh sentral dalam suatu



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang Kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang Kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena Kiai yang menggantikannya tidak sepopuler Kiai yang telah wafat itu”.¹⁷

Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.¹⁸ Sedangkan menurut Abdullah Ibnu Abbas, kiai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala.¹⁹

Menurut Ahmad Sarwat, Lc., MA dalam artikel Konsultasi Fiqih yang berjudul ulama, kiai dan ustadz, apa bedanya?²⁰ Pengertian dari diksi Ulama dalam istilah fiqh memang sangat spesifik, sehingga penggunaannya tidak boleh pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan disetujui oleh umat Islam. Lain halnya dengan sebutan kiai, yang bukan istilah baku dari agama Islam. Panggilan kiai bersifat sangat lokal, mungkin hanya di Pulau Jawa bahkan hanya Jawa Tengah dan Timur saja, di Jawa Barat orang menggunakan istilah Ajengan.

Melihat realita ini, sepertinya panggilan kiai memang tidak selalu mencerminkan tokoh agama, apalagi ulama. Asal-usulnya perkataan

¹⁷ Saiful AKyaiyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), hal 169

¹⁸ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), hal 55

¹⁹ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hal 18

²⁰ <http://www.rumahfiqih.com/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2019

kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda

:

- 1) Gelar kehormatan untuk sebuah barang yang kramat;
- 2) Gelar kehormatan untuk orang tua biasanya;
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren. Selain gelar Kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keIslamannya).²¹

Kiai dengan pengetahuan Islamnya, masih sering dipandang sebagai seseorang yang senantiasa mampu memahami keagungan Tuhan. Dalam beberapa hal, kiai menunjukkan kekhususannya dalam bentuk berpakaian yang merupakan symbol kealiman.²²

c. Ciri-ciri Kyai

Menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad didalam kitabnya An-Nashaihud Diniyah bahwa ciri-ciri kiai di antaranya ialah: Dia takut kepada Allah, bersikap zuhud pada dunia, merasa cukup (qana`ah) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya. Ditengah masyarakat seorang kiai itu suka memberi nasehat, selalu bersama kebajikan dan menjauhi

²¹ ZamaKyaisyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hal 55

²² Ibid. Hal 56

kemungkarannya dan larangan Allah. Kiai itu ikhlas dan legowo, tidak tamak pada apa yang ada pada mereka.²³

Di dalam Hadits Shahih Muslim di sebutkan dari Ibnu Mas'ud ra, dia berkata. Rasulullah saw bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang didalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat zaarah (HR. Muslim).²⁴

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri Kyai di antaranya yaitu:

- 1) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah
- 2) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi
- 3) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup
- 4) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- 5) Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.²⁵

Endang Turmudi meklasifikasikan Kiai menjadi empat kategori yaitu: Kiai Pesantren, adalah Kiai yang memusatkan perhatian pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui peningkatan pendidikan. Kai tarekat, memusatkan

²³ A. Mustofa Bisri, Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan (Rembang : Lembaga Informasi dan Studi Islam (Lⁿ Islam) Yayasan Ma`had as-Salafiyah. 2003), hal 26

²⁴ Terjemahan Buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, oleh Kathur Suhardi, Madarijus Salikin (Pendakian Menuju Allah) Penjabaran Kongkret "Iyyaka Na" budu waiyyaka Nasta`in" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 264

²⁵ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, hal 102

kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kyai panggung, adalah para dai. Dengan kegiatan dakwah ini mereka menyampaikan secara transformatif dan mengembangkan ilmu keagamaannya, yakni Islam. Kyai politik, adalah tipe Kyai yang memiliki konsen atau perhatian pada dunia politik praktis.²⁶

Sementara Tipologi Politik Kyai dalam buku Imam Suprayogo mendeskripsikan, Kyai dalam masyarakat dibedakan menjadi Kyai politik, Kyai netral dan Kyai yang tidak peduli pada politik praktis. Seorang Kyai disebut sebagai Kyai politik, karena banyak melakukan kegiatan politik praktis. Para Kyai yang masuk kategori ini diantaranya ada yang menempatkan diri dengan pemerintah, sebagian lainnya menempatkan diri sebagai mitra kritis. Kyai yang mengambil jarak baik dengan pemerintah maupun partai politik disebut Kyai netral. Selain itu yang jumlahnya justru lebih banyak di pedesaan adalah Kyai yang tidak begitu peduli dengan politik praktis, mereka lebih banyak berkonsentrasi pada kehidupan spiritual dan fokus mengajarkan agama di pesantrennya masing-masing, karena mereka menganggap politik adalah bukan bidangnya.²⁷

²⁶Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2003), hlm. 32.

²⁷ Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, *Kyaidan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, (UIN Malang Press, 2009), hal 50

3. PEMILU

a. Pengertian Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana menyampaikan aspirasi suara rakyat yang dalam pelaksanaannya masyarakat dibebaskan memilih calon pemimpin. Pemilu juga sudah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) bahwa pemilu atau pemilihan umum ini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pengertian pemilu atau pemilihan umum dalam ilmu politik, bisa dikatakan sebagai kegiatan politik, dimana pemilihan umum merupakan institusi dan juga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Didalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum adalah salah satu bagian yang penting, karena salah satu alat ukur demokratis atau tidaknya suatu negara ialah dari bagaimana pemilihan umum yang dilakukan oleh negara tersebut.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat.²⁸ Praktik dari pemerintahan oleh rakyat ialah dengan cara memilih wakil rakyat melalui sebuah cara pemilihan umum. Pemilihan umum ialah satu cara untuk memilih wakil rakyat, sebagai suatu bentuk pengaplikasian dari demokrasi itu sendiri pemilihan umum juga

²⁸ C.S.T. Kansil. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986, h.47

berguna sebagai filter yang menyaring calon wakil rakyat yang memang benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Melalui pemilihan umum ini masyarakat bisa memilih wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan dan pelaksanaan kehendak rakyat yang digariknya oleh wakil-wakil rakyat tersebut.²⁹

b. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum dapat dirumuskan sebagai pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilihan umum atau calon anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum adalah cara merubah politik terkait pola dan arah kebijakan publik, atau mengenai perputaran elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.³⁰

Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang bertugas memimpin roda pemerintahan. Kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkan diakhir masa jabatannya.

Arti dari jabatan politik ialah mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan

²⁹ Cholisin, dkk. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) Alih Bahasa oleh Zulkifly Hamid), Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007, h. 95

³⁰ Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, Yogyakarta, hal 8

yang melibatkan elemen politik dengan memilih rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitranya.³¹

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang berjudul Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 yang ditulis oleh Dita Adistia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.³²

Hasil dalam penelitian ini adlaah pada aspek kognitif Kiai dan santri mengetahui adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, namun sebagian santri belum mengetahui figure, visi, misi, latar belakang, dan kandidat Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada aspek afektif Kiai dan santri mengaku senang terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bandar Lampung, namun mereka mengaku biasa saja terhadap figure, visi, misi, dan latar belakang Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada

³¹ Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hal 637

³² Dita Adistia, Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Skripsi, (Universitas Lampung Bandar Lampung) 2015.

aspek evaluative Kiai dan santri memberikan penilaian yang baik terhadap proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampung namun santri dan Kiai memberikan penilaian negative terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar.

Kedua, artikel yang berjudul Kiai Dan Politik: Mengintip Motif Kiai Nu (Nahdlatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang ditulis oleh H. Sadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi.³³

Tulisan dalam jurnal ini mengarah kepada Keterlibatan Kiai dalam politik Indonesia, modal dasar lain yang dimiliki Kiai adalah legitimasi teologis, dimana sosok Kiai dianggap sebagai sosok pewaris para Nabi (Al Ulama' Warasatul An Biya'). Maka tidak heran kemudian posisi yang sangat strategis ini menjadi basis peneguhan legitimasi dan peran Kiai di masyarakat. Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan beragamnya sikap politik Kiai dan juga untuk menjawab motif yang melatarbelakangi Kiai terlibat pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kecamatan Glenmore Banyuwangi, untuk mengetahui peran politik Kiai dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Ketiga, artikel yang berjudul Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat yang ditulis oleh Eko Setiawan (Alumnus Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Brawijaya Malang).

Kesimpulan daripada jurnal ini adalah bagaimana pilihan ke politik praktis oleh para Kiai sama halnya dengan menelanjangi dirinya sendiri di mata masyarakat. Tidak ada lagi kewibawaan dan Kharisma yang terpancar dari

³³ H. Sadi, Kiai Dan Politik: Mengintip Motif Kiai Nu (Nahdlatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi, Jurnal Ilmiah Kependidikan KYAIAZANAH PENDIDIKAN, Vol. X, No. 1 (September 2016)

sosok Kiai, karena “pragmatisme” (jabatan politik) telah menjauhkannya dari identitas yang genuine, yaitu sebagai sosok dan figur yang bisa menjadi teladan dan pengayom masyarakat dalam semua lapisan. Kiai tidak lagi dianggap sebagai figur terhormat dan penuh wibawa. Tetapi sebaliknya, Kiai dianggap sebagai sosok yang mudah diperjual-belikan. Jabatan politik yang disandangnya malah semakin membuat masyarakat berani menentang dan mengecam Kiai. Nilai-nilai kesakralan yang sangat kental pada sosok Kiai tiba-tiba meluntur setelah ia menjabat dalam struktur pemerintahan.³⁴

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas yang merupakan penjabaran secara singkat terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, maka sudah jelas pula, bahwa fenomena Desakralisasi politik kiai ini adalah benar-benar penelitian yang belum pernah dibahas dan layak untuk diteliti dan dilanjutkan. Kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain dan sebelum-sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan sesuatu untuk menguji data lapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, teori merupakan laot penting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak aka nada ilmu pengetahuan.

³⁴ Eko Setiawan, Keterlibatan Kyai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. Alumnus Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Brawijaya Malang Jurnal Ilmiah, Oktober 2017

Kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Teori Pilihan Rasional

Rasionalitas adalah konsep dasar yang dipakai Weber dalam pengkategorian sampai tipe pada tindakan rasional. Menurut Weber tindakan rasional bersama dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.³⁵ Pengertian rasional disini adalah masuk di akal, menitik beratkan pada aktor, dipandang sebagai manusia yang mempunyai orientasi. Artinya aktor ini memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu.

Teori pendekatan rasional menunjukkan bahwa pemilih akan memilih bila mereka merasakan adanya simbiosis mutualisme. Pada saat pemilih merasa tidak ada timbal baliknya dengan memilih kandidat yang bertarung, mereka tidak akan terbawa arus pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih.

Fenomena ini seringkali dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik praktis. Bagi rakyat, banyak yang memperhitungkan laba rugi berkenaan dengan partai politik mana yang akan dipilih. Disini sebab kesadaran masyarakat berpengaruh. Pendekatan ini acap kali memandang berdasarkan

³⁵ Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 220.

asumsi dasar, yakni dimana setiap orang selalu mengutamakan *self-interest*.³⁶

2. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan cara penyampaian informasi tentang politik dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah.³⁷ Proses ini disebut sebagai proses ketergantungan atau bersinambungan, dikarenakan perputaran informasi ini berada di antara pribadi masing-masing dengan kelompok di semua tingkatan masyarakat. Hal ini merupakan sarana perspektif dan opsi serta anjuran pemerintah dilanjutkan ke anggota masyarakat, berikut pula melibatkan respon anggota dan masyarakat kepada pandangan dan janji politik serta saran para elit politik.

Komunikasi politik memposisikan peranan yang sentral dalam sistem politik itu sendiri, dalam menentukan elemen dinamis, yang menjadi menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan pengrekrutannya.³⁸ Dari definisi di atas, bisa diartikan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik yang berbanding lurus dari bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik

³⁶ Skripsi. Rubiyanti rika. pengaruh popularitas terhadap pilihan pemilih pemula (fenomena masuknya artis dalam politik) (fisp_universitas Sumatra. 2009)

³⁷ Ibid, hal 152

³⁸ Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2008. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali Press

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mencari data dengan *out put* dan suatu kegiatan tertentu. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Desakralisasi Kyai Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018” Studi kasus Kiai Abdul Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang akan digunakan.

Model penelitian ini adalah model penelitian deskriptif, untuk memberikan ilustrasi terkait masalah yang diteliti, dan guna memberi penjabaran data secara sistematis³⁹, tentang “Desakralisasi Kyai Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018” Studi kasus Kiai Abdul Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. Informan Penelitian

Dalam hal menentukan informan ini peneliti memakai metode *Purposive Sampling*. Metode ini mengambil contoh berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁴⁰ Informan pada penelitian lapangan ialah warga yang berkomunikasi dengan peneliti dan yang menjabarkan terkait informasi di lapangan. Meskipun dari setiap

³⁹ Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. hal.8

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal. 65

masyarakat bisa menjadi informan, namun tidak semua orang sebagai informan yang tepat.⁴¹ Peneliti sudah memilah informan yang dianggap mampu memberikan informasi terkait problem yang ada.

Pertama, peneliti memilih Tokoh Agama sebagai sumber utama, karena dianggap yang lebih tahu secara kultural dan juga lebih memahami medan dibawah, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat sekitar Banjarwati Paciran Lamongan, yakni Bapak Muhammad Zainal selaku Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Banjarwati Paciran Lamongan.

Selanjutnya peneliti menentukan informan berikutnya yakni dari unsur pemerintah Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yakni Bapak Sutiyono dan Bapak Riyadlus Sholihin.

Informan terakhir yakni masyarakat Banjarwati Paciran Lamongan, yakni Robith Abdillah, Fadhol Annarso, Muhammad Choirul, dan Gus Fafa.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Guna mendapatkan data konkrit pada penelitian ini, peneliti mencari data yang mendekati dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut mampu berperan menjadi instrumen penelitian, tentang “Desakralisasi Kyai Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018” Studi Kasus Kiai Abdul

⁴¹ Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hal 92

Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, karena itu, model dan data penelitian ini sebagai berikut :

a. Jenis Data

1) Data Primer.

Merupakan data yang diperoleh melalui sumber data pertama di lapangan yang diperoleh. Data primer ini, didapatkan dengan mencari konklusi dari pertanyaan melalui wawancara secara langsung.⁴² Wawancara langsung dengan masyarakat Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan setelah data primer. Data ini dibuat bahan pembandingan dari data primer yang telah diperoleh.⁴³

b. Sumber Data

Pada penelitian ini subyek dari mana data diperoleh. Data yang digunakan peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

- 1) Informan, Informan adalah orang yang tahu semua hal yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud.

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), hal 129.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), hal 129

- 2) Dokumen, berbentuk tulisan/catatan yang berkaitan dengan yang akan dibahas dalam penelitian tentang “Desakralisasi Kyai Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Studi di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adalah poin paling penting dalam penelitian ini yaitu memperoleh data. karena tujuan utama dari penelitiannya adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti memakai beberapa cara menghimpun data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

I. Teknik Analisis Data

Adalah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memakai teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman diantaranya terdiri dari tiga aspek utama/ritme kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Merupakan instrument dan juga kerangka berfikir dalam pada penelitian skripsi. Supaya lebih mudah memahami penelitian skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini disuguhkan dengan orientasi supaya pembaca mampu memahami secara jelas dan lugas terkait latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep serta sistematika pembahasan pada penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini Peneliti akan mengeksplorasi kerangka teori mengenai Teori Komunikasi Politik dan Teori Pilihan Rasional yang digunakan sebagai landasan konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian yang Peneliti angkat.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Isi dalam bab ini adalah sebagai acuan kegiatan penelitian memuat: Lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, demografis dari aspek sosial budaya, dan aspek pendidikan. Serta memuat kondisi umum objek penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai pemaparan data dan pembahasan tentang “Desakralisasi Kyai Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018” Studi Kasus Kiai Abdul Ghofur Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Terakhir dalam bab lima ini berisi penutup yang menjabarkan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional yang biasanya yang disebut sebagai *Rational Choice Theory* atau teori tindakan rasional memiliki peran kuat pada analisa ekonomi, namun selanjutnya diadopsi oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Teori ini berawal pada sosiologi Max Weber, namun dalam sosiologi pada tahun 1990-an, mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya Seksi Pilihan Rasional (*Rational Choice Section*) pada tahun 1994 di negara tersebut.

Pusat perhatian berbagai pendekatan teori tentang perilaku pilihan rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat. Dari cara ini, untuk menentukan dalam sebuah pemilu tidak hanya pada ketergantungan pada ikatan struktural sosial maupun ikatan partai yang kuat, tidak lain adalah hasil penilaian rasional dari masyarakat sendiri. Dalam hal cara semacam ini, perlakuan dan pilihan politik tokoh populer tidak selamanya diikuti dan diimani oleh para pengikutnya jika secara akal saja tidak memberikan keuntungan. Selanjutnya ada beberapa indikasi yang biasa digunakan para pemilih guna memberikan penilaian terhadap seorang calon, lebih khusus untuk pejabat birokrasi yang mau mengikuti kontestasi lagi, adapun hal-hal

yang diperhitungkan yakni kualitas, kapabilitas, dan integrasi calon.⁴⁴ Menurut Anthony Downs, masyarakat yang rasional biasanya hanya untuk memenuhi egonya sendiri ataupun jika tidak, mereka selalu memprioritaskan kepentingan pribadinya diantara kepentingan yang lain, hal ini bisa diartikan dengan *self interest axiom*.⁴⁵ Meskipun menurut perspektif Anthony Downs ini belum bisa dikatakan keseluruhan orang ini adalah orang yang egois, ”bahkan dalam politik sekalipun,” tetapi mereka berada dititik kesimpulannya bahwa “sosok-sosok heroik” ini dari segi kuantitas bisa diabaikan.⁴⁶

Dalam pribadi seseorang melakukan tindakan egois, terutama karena pribadi ini ingin mengupayakan kesejahteraan materi mereka sendiri, yakni pendapatan atau kekayaan mereka. Jika ini terjadi dan diimplementasikan pada perilaku pemilu, maka bisa digaris bawahi jika pemilih yang rasional akan memilih partai atau calon yang lebih memberikan janji dan keuntungan bagi pribadinya. Tipe pemilih seperti ini biasanya tidak begitu tertarik dengan konsep politis sebuah partai, tetapi lebih kepada laba yang besar dan yang mampu mereka dapatkan jika partai atau calon ini menduduki kursi birokrasi dibandingkan dengan partai atau calon lain.

Menurut Ramlan Subakti pilihan rasional adalah bagaimana cara kita memilih dan memilah atau sekadar melihat saja bentuk kegiatan perilaku pemilih sebagai produk perhitungan diantaranya adalah untung dan rugi. Hal

⁴⁴ <http://bluean9el.wordpress.com/2011/11/22/rational-choice-theory-teori-pilihan-rasional/>. Diakses pada 06 Januari 2019.

⁴⁵ Anthony Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie*, engl.: An Economic Theory of Democracy 1957 (New York: Tübingen, 1968), hal 26.

⁴⁶ Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie*, hal 27.

ini dikarenakan pemilih tidak hanya mengkalkulasikan ongkos untuk memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil akhirnya nanti, namun perbedaan itu dari alternatif atau opsi pilihan yang lain yang berupa pilihan yang ada. Pemilih dalam pendekatan ini ditafsirkan mempunyai motivasi, keyakinan, pendidikan, pengetahuan, dan relasi yang cukup.⁴⁷

Dari pendekatan rasional, faktor-faktor kondisi berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada persepsi dan sikap seorang pemilih terhadap kepribadian kandidat tanpa memperdulikan label partai yang mengusung kandidat tersebut.⁴⁸

Penerapan pendekatan *rational choice* dalam ilmu politik salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat terhadap kandidat atau partai tertentu dalam konteks pemilu. Teori pilihan rasional sangat cocok untuk menjelaskan variasi perilaku memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan karakteristik. Pergeseran pilihan

⁴⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal 146.

⁴⁸ <http://bluean9el.wordpress.com/2011/11/22/rational-choice-theory-teori-pilihanrasional/>. Diakses pada 06 Januari 2019.

dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis maupun psikologis, di daerah pedesaan, tidak semua pilihan menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas didalam menentukan pilihannya.

Pemilih yang berprinsip rasional lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang bermukim di daerah urban. Tingkat pendidikan yang dimiliki serta pemahaman akan politik mempunyai korelasi positif terhadap perilaku pemilih yang semakin rasional. Penduduk yang bermukim di negara-negara maju, seperti Australia yang terkenal memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi, hal itu dapat dilihat dari tingkat buta huruf yang sangat minim.

B. Teori Komunikasi Politik

Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia.

Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembang-

kan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik.⁴⁹

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta segala aspek dan poblematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai “proses penyampaian pesan”, tetap saja akan muncul pertanyaan, apakah dengan demikian komunikasi politik berarti “proses penyampaian pesan-pesan politik”. Lalu apa yang disebut pesan-pesan politik itu? Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelusuri pengertian komunikasi sendiri dan politik, paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah penelitian ini.

1. Pengertian Politik

Sejarah memahami teori politik. *Politics*, dalam Bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun megenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti *politics* (menyangkut warga negara), *polities* (seorang warga negara), *polis* (kota negara), dan *politeia* (kewarganaan). Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai Tindakan-tindakan, termasuk

¹ Nina Winangsih Syam, Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi. (Bandung: Unpad, 2002), hal 18.

Tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran ini selaras dengan konsepsi seorang antropologi semisal smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian Tindakan yang mengarahkan dan menata urusan-urusan publik.⁵⁰

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti berkewarganegaraan.⁵¹

Politik secara etimologi adalah poteia dengan akar kata polis dalam Bahasa Yunani yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia yang berarti urusan.⁵² Menurut Nimmo politik adalah kegiatan yang secara kolektif mengatur perbuatan mereka didalam kondisi konflik social.⁵³ Max Webber mendefinisikan politik sebagai usaha untuk menggunakan akal dan kekuatan social untuk memengaruhi jalannya pemerintahan.⁵⁴ Demikian politik juga segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau memertahankan, suatu bentuk tatanan masyarakat.

⁵⁰ Nie dan Verb, *Political Participation, Handbook of political Sciences*. Fredi. Greenstein & Nelson W,P. (eds).(Addison: Wesley Publishing Company, 1975), hal 486

⁵¹ Muhammad Azhar. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta, Rajawali Pers.1997), hlm. 21

⁵² S. Sumarsono. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001,cetakan ketujuh), hlm. 137

⁵³ Fathurin Zen, *NU Politik* (Yogyakarta: elkis, 2004), hlm. 66

⁵⁴ Masyur semma, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran mochtar Lubis atas Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor, 2008), hlm. 91

Aristoteles, dapat dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang dia sebut *zoonpolitikon*. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya Ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, Ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan Ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.

Aristoteles menyimpulkan bahwa Upaya memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut

seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Politik dewasa ini menjadi suatu hal yang tidak asing dalam benak masyarakat. Pada dasarnya politik telah mengakar dengan hidup manusia, karena adanya kepentingan hidup sesame individu, kelompok dan masyarakat secara luas pasti terdapat unsur politik didalamnya. Pemberitaan politik melalui media sangat gencar, seperti halnya pemilihan DPR, DPRD hingga presiden diekspos besaran oleh media. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, maka secara tidak langsung dampak yang diberikan masyarakat bisa membicarakan apa saja yang berhubungan dengan perpolitikan, tentu dengan catatan-catatan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Peter Merkl politik adalah usaha untuk mencapai tatanan, suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh Sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan Bersama yang harmonis.⁵⁵

2. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan prilaku politik yang terintegrasi kedalam suatu sistempolitik dengan menggunakan simbol-simbol yang benar. Pengertian lain

⁵⁵ Miriam B. Dkk, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15

yaitu dari Rusdi Kantaprawira, komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan instansi, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik pemerintah.⁵⁶

Komunikasi politik adalah pembicaraan untuk memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (art of possible) dan bahkan dapat merupakan seni yang tidak mungkin menjadi mungkin (art of impossible).⁵⁷

Definisi komunikasi politik, secara definitive, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argument, perselisihan, dan percecokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan, inilah kegiatan politik.

Secara filosofis hakikat komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai keinginan yang

⁵⁶ Rochmat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik sebagai suatu pengantar, (Bandung: Bandar Maju, 2006), hlm.3

⁵⁷ Anwar Arifin. Komunikasi Politik (Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan – Strategi dan komunikasi Politik Indonesia). (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1

mendorong manusia untuk berkiprah yang mengarah kepada terpenuhinya hal tersebut.

Komunikasi politik menjadi disiplin ilmu pada awal tahun 1950-an, istilah komunikasi politik pertama kali di kemukakan secara tegas oleh Euleau, Eldersveld, dan Janowitz pada tahun 1956. Sejalan dengan munculnya perubahan baru itu terbit pula kajian-kajian politik yang mendudukan komunikasi sebagai faktor penting dalam politik. Komunikasi politik mempunyai salah satu fungsi yang sangat penting dalam sistem politik.

Mengenai komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah Upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan dimana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan.

Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.⁵⁸

3. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Varma, S.P. Teori Politik Modern, hal 258.

⁵⁹ Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, hal 28.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Adapun keterlibatan 21 Kiai sepuh Jawa Timur dan juga Kiai Abdul Ghofur dalam pilgub Jatim 2018 yang mengusung pasangan Gus Ipul-mbak Puti ini adalah sebagai actor, yaitu Kiai berperan sebagai tim sukses atau juru kampanye sekaligus sebagai partisipan, dimana Kiai memberikan restu pada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Aktifitas keagamaan yang biasa dilakukan oleh Kiai Abdul Ghofur berupa Pengajian, Istighotsah dan acara Keagamaan yang lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Banjarwati

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di Desa Banjarwati dapat dilihat bahwasannya Desa Banjarwati adalah satu dari sekian desa yang terletak di kota Lamongan, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Desa Banjarwati bisa dikatakan berpendudukan padat, mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Banjarwati petani, bercocok tanam, nelayan, dan penjual.⁶⁰

Letak Geografis Desa Banjarwati terdapat di wilayah dataran rendah koordint diantara 6,87772 dan luasnya 60,805 Ha/M2. Luasnya datarannya 40 Ha dan perbukitannya 21 Ha.⁶¹ Kondisi tanah di wilayah dataran rendah terdiri dari rumah, sawah, kebun dan perkarangan. Sedangkan, pengaliran air kesawah-sawah cukup baik dan efeknya bisa menjadikan tanah lebih subur dan penghasilannya bisa naik.

Desa Banjarwati berbatasan dengan dengan desa Kemantren disebelah utara dan timur, berbatasan dengan desa Drajat sebelah selatan dan berbatasan dengan desa Kranjil disebelah Barat.

Birokrasi di desa Banjarwati letaknya di rukun tetangga (RT) 01, rukun warga (RW) 03. Disana terdapat satu dusun dan sepuluh rukun tetangga (RT).⁶²

⁶⁰ Hasil obsevasi di Desa Banjarwati, pada tanggal 15 Januari 2019

⁶¹ Hasil obsevasi di Desa Banjarwati, pada tanggal 15 Januari 2019

⁶² Ibid, pada tanggal 15 Januari 2019

Total penduduk didesa Banjarwati adalah 3.540 jiwa terhitung 1.920 laki-laki dan 1.620 perempuan dengan total kepala keluarga berjumlah 558.⁶³

2. Kondisi Demografis Desa Banjarwati

W.J.S. Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Demografi merupakan suatu pengetahuan tentang kependudukan, pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk.⁶⁴ Ilmu demografi bisa terlibat keadaan pertumbuhan masyarakat yang meningkat dan menurun setiap tahunnya melalui data yang ada didalam demografi desa tersebut.

a. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian melalui metode wawancara dengan Bapak Sutiyono peneliti mendapatkan keterangan dari Bapak Sutiyono bahwa :

*“ Alhamdulillah mas, semua masyarakat Desa Banjarwati ini beragama Islam. di Desa Banjarwati ada 2 masjid dan 5 mushollah. Sarana ibadah di Desa Banjarwati ini dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masyarakat Desa Banjarwati yaitu Islam.”*⁶⁵

Gus Fafa selaku putra Kiai Sutikno Sunan Drajat 8 juga menjelaskan tentang kondisi sosial keagamaan di Desa Banjarwati pada saat wawancara bahwasannya:

⁶³ Ibid, pada tanggal 15 Januari 2019

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, tt). Hlm. 239

⁶⁵ Sutiyono, Wawancara, 15 Januari 2019

“Kehidupan sosial keagamaan Desa Banjarwati terbilang rajin mas, banyak kegiatan yang dilakukan di des aini. Salah satu ya punya kegiatan mingguan, hamper setiap hari ada kegiatan keagamaan kok disini mas, kayak senin malam selasa ada jam 'iyyah dhiba' putri di RW 01, kemudian hari kamis malam jum'at ada jam 'iyyah tahlil putra pada pagi hari, jum'at juga ada kegiatan santri bareng warga, ngaji bareng Kiai Abdul Ghofur di Masjid Jelag. Dalam hal beribadah seperti sholat lima waktu, sholat jum'at dan sholat hari raya, sarana beribadah di des aini tersedia cukup baik.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas bisa terlihat bahwasannya kegiatan keagamaan didesa Banjarwati terbilang damai.

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah suatu program yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia terutama para generasi penerus bangs aini, para generasi penerus bangsa akan bisa menjadikan negara ini lebih maju disegala bidangnya dan tidak sampai tertinggal dari bangsa lain.

Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari dengan Bapak Sutiyono mengatakan bahwa:

“tingkat Pendidikan di desa Banjarwati ini ya ditunjang dengan keberadaan pondok pesantren Sunan Drajat itu mas, disana ada Madrasah Ibtidaiyah, Paud, TK dan TPQ. Ada juga Pendidikan informal seperti Hadrah al-banjari, Kentrung Macapat dan Qosidah Persada Ria milik pondok

⁶⁶ Gus Fafa (Putra Kiai Sutikno Sunan Drajat 8), Wawancara, 12 Januari 2019.

*pesantren. Tercatat dari data desa Sebagian besar latar belakang Pendidikan masyarakat kita ada 195 orang lulusan SMP, 616 orang lulusan SMA, 194 orang lulusan S1, 12 orang lulusan S2 dan 3 orang untuk lulusan S3.*⁶⁷

c. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di Desa Banjarwati dapat dilihat kondisi sosial dan budayanya terlihat bahwa mereka tetap melestarikan tradisi yang diwariskan dari pendahulu-pendahulunya, contoh megengan. Megengan merupakan kegiatan dimana kegiatan ini sudah ada sejak dulu atau tradisi untuk mendo'akan segenap keluarga yang sudah wafat, kegiatan ini juga dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadhan yang akan datang dan dilaksanakan sebelum menginjak bulan suci Ramadhan, dan kegiatan ini dilakukan di masjid dan langgar (musholla) setempat, kemudian warga akan membawa kotak makanan (berkat) dengan tujuan untuk diberikan ke orang-orang yang hadir diacara tersebut.⁶⁸

Selain kegiatan megengan, warga Banjarwati juga masih intens untuk melaksanakan kegiatan lain yakni ziarah ke makam wali-wali, makam keluarganya, sesepuhnya, dan tokoh-tokoh agama yang telah pergi meninggalkan dunia.

Selain itu bapak sutiyono menyampaikan bahwa kegiatan lain yang masih dilestarikan sebagai budaya setempat:

⁶⁷ Sutiyono, Wawancara, 15 Januari 2019

⁶⁸ Observasi di Desa Banjarwati, 15 Januari 2019

“ Disini ada malam satu suro mas, kegiatan ini sebagai bentuk peringatan jatuhnya malam satu suro menurut orang Jawa, yang juga berarti mulainya bulan Muharram dalam penanggalan Hijriyah, nek wong biyen iku ngomonge tekane malem satu suro iki yo berkah bag semua umat muslim didunia, soale bulan Muharram iki salah satu waktu sing apik dan special diantara empat bulan lain, dimana Allah akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu.”⁶⁹

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah warga atau masyarakat di desa Banjarwati masih terus melestarikan tradisi-tradisi yang ada yang diwariskan dari pendahulu-pendahulunya yang sudah lama meninggal dunia.

d. Kondisi Sosial Politik

Keadaan sosial politik adalah suatu gambar dinamika yang ada di masyarakat guna melihat suatu politik. Keadaan sosial politik melibatkan pola interaksi masyarakat sehari-hari dan juga melibatkan afiliasi politik. Keadaan sosial politik juga mempunyai arti suatu pemaparan pola yang berlangsung didalam masyarakat akibat dari pemikiran-pemikiran politiknya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sutiyono selaku Kepala Desa Banjarwati mengenai keadaan sosial politik adalah sebagai berikut:

“Dalam dunia politik masyarakat desa Banjarwati bisa dikatakan sebagai masyarakat yang melek politik. Mereka berusaha menjadi warga negara yang baik dan demokratis. Saat momentum pemilu saja katakana, masyarakat desa Banjarwati ini menyambut dengan antusias dan baik, mereka

⁶⁹ Sutiyono, Wawancara 15 Januari 2019

selalu ikut andil dalam menyalurkan hak suaranya. Untuk tingkat suara golongan putih (golput) di desa ini terbilang rendah.”⁷⁰

Jadi kesimpulannya adalah masyarakat di Desa banjarwati sangat berantusias dalam dunia politik dan jarang diantara mereka yang buta akan dunia politik.

B. Dinamika Politik Desa Banjarwati

Dinamika politik Desa Banjarwati tidak terlepas dari peran Ulama’. Dalam dinamika politik memang tidak dapat diragukan lagi, sedari zaman penjajahan peran politik Ulama’ terbukti sangat besar secara historis yang begitu panjang, terlebih saat ini Ulama’ telah menjadi bagian dari peta politik di Indonesia, dengan istilah yang sedikit dimodernkan yakni “Ulama’ dalam pusaran politik nasional”.

Dalam konteks dinamika politik di desa Banjarwati terlihat di acara pemilihan kades dan pemilihan lainnya seperti pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, dan pemilihan Gubernur, dll. Keadaan tersebut lebih dipengaruhi oleh elit agama, dalam hal ini dimaksud adalah keberadaan Kiai Abdul Ghofur yang dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat Banjarwati. Keadaan tersebut terlihat saat pemilihan kades tercatat tahun 2009 dan tahun 2014 dukungan dari Kiai Abdul Ghofur dapat menentukan hasil suara terakhir pemilihan. Bahkan dalam fenomena pilkada Jawa Timur pada tahun 2014,

⁷⁰ Sutiyono, Wawancara, 15 Januari 2019

bahwa dukungan Kiai Abdul Ghofur kepada pasangan Soekarwo-Gus Ipul dapat unggul dari pasangan Khofifah-Herman.

Kecenderungan pemikiran masyarakat tentang keadaan menggaet dukungan dari kalangan ulama' dan tokoh dari ponpes bagi para politisi adalah suatu upaya memperoleh suara sebanyak-banyaknya ataupun sekedar legitimasi kepentingan-kepentingan politik masih tinggi. Namun hal tersebut dibantah oleh Kiai Abdul Ghofur selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren Sunan Drajat, beliau mengajak masyarakat umum melalui media massa yang dimilikinya seperti saluran radi, TV dan majalah-majalah, beliau mengatakan bahwa:

*“Kita harus mendukung siapapun yang akan menjadi calon pemimpin dengan partainya asalkan dia peduli terhadap pondok pesantren dan dengan visi misi untuk kemaslahatan masyarakat.”*⁷¹

Secara umum dengan cara apa yang difatwakan beliau ini adalah bertujuan untuk menggalang masa dan simpati masyarakat untuk kemenangan partai Gerindra khususnya desa Banjarwati Kecamatan Paciran dan sekitarnya, karena beliau juga termasuk Kiai yang menggagas berdirinya partai tersebut dan secara struktural beliau juga masuk dalam jajaran dewan Pembina dan penasehat partai tersebut.

Secara historis, *trackrecord* Kiai Abdul Ghofur selalu mentereng untuk memenangi kontestasi politik praktis baik ditingkatkan desa, kecamatan,

⁷¹ Suara Kawan, “Gerindra Restui Prabowo Maju Dipilpres 2014”, <http://suarakawan.com/2013/03/17/gerindra-restui-prabowo-maju-di-pilpres-2014/>, Di Unduh pada Rabu, 20 Maret 2019 puku 03:04 WIB

kabupaten maupun wilayah, Kiai Abdul Ghofur juga dikenal masyarakat sekitar Pondok Pesantren Sunan Drajat yakni masyarakat Banjarwati, Kemantren Kranji dan sekitarnya ini sebagai Kiai yang mempunyai Kharisma, wibawa dan pengaruh yang tinggi.

Kiai Abdul Ghofur sebagai elit agama yang terjun dalam dunia politik, dengan dasar pemikiran bahwa suara Kiai dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Berbicara tentang Kiai Abdul Ghofur terkait kepemimpinannya, maka tidak bisa terlepas dari yang disebut kekuasaan, meskipun tidak serta merta kekuasaan itu diartikan sebagai arti penguasa tetapi dikiaskan kepada sosok pemimpin umat yang segala ucapan dan Tindakan beliau adalah fatwa yang harus diikuti oleh masyarakat sekitar atau santri-santrinya. Biasanya hal ini merupakan gejala yang selalu bermunculan dalam proses politik. Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya.

Secara umum pola atau sikap yang dimiliki Kiai Abdul Ghofur dalam pandangan teori tindakan sosial terkategori sebagai *Traditional Action*, suatu pola tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu. Dalam studi ini Kiai Abdul Ghofur dalam tindakan politiknya yang memiliki gaya pemahaman yang dipelajari dari beberapa kitab klasik yang kemudian disalurkan ke pondok-pondok tradisional. Secara tidak sengaja melalui pola pengajaran yang relative sama, maka Kiai Abdul Ghofur teridentifikasi memiliki pola tindakan sosial yang hamper sama pula.

Hal ini yang membuat para calon kepala daerah bahkan petinggi partai politik tak segan-segan datang ke *ndalem* atau Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk sekedar silaturahmi, tidak lupa juga dengan membawa rangkaian misi atau kepentingan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Zainal selaku tokoh agama di desa Banjarwati:

”Kiai Abdul Ghofur tidak pernah berpatokan terhadap salah satu partai politik maupun calon pemimpin dari tingkatan desa sampai daerah, namun mereka yang mau membantu mengurip-uripi pesantren akan didukung oleh Kiai Abdul Ghofur.”⁷²

Sejarah partai politik yang begitu Panjang beserta konflik berdarahnya menjadi semacam kenangan pahit yang terekam dalam memori sejarah rakyat dunia yang pada akhirnya memicu munculnya penolakan terhadap eksistensi partai politi. Romantisme partai politik yang memiliki banyak variannya mulai dari sosialisme, fasisme, komunisme Kristen Demokrat dan sebagainya, sampai akhirnya tinggal catatan sejarah yang kini tidak henti-hentinya dikaji oleh banyak kalangan termasuk diantaranya mahasiswa..

Secara kelembagaan partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat dengan fungsinya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah saat itu.⁷³ Keberadaan partai politik juga mendapat respon dari negara dan masyarakat, karena partai politiksejatinya lahir dari Rahim

⁷² Bapak Muhammad Zainul, Wawancara, 16 Januari 2019

⁷³ Miriam Budiardjo, *Daar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 399.

masyarakat dan dewasa dibawah sebuah negara. Namun tentu tidak semua negara memberikan respon positif terhadap keberadaan partai politik.

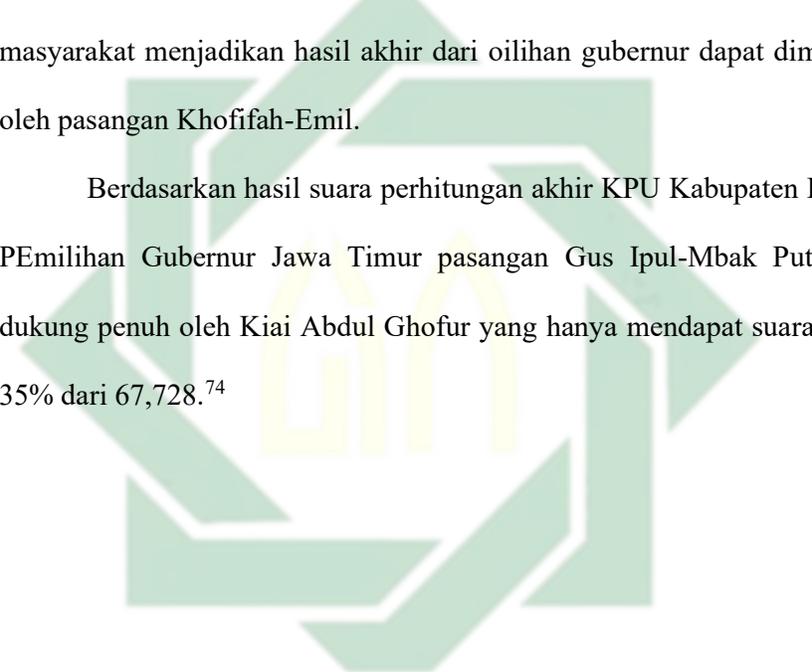
Posisi partai politik selain berada diantara masyarakat dan negara, partai politik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kepekaan sosial pemerintah sehingga keduanya tidak memiliki jurang pemisah dengan hadirnya partai politik. Oleh karena itu, partai politik tidak hanya berkisar pada perjuangan memperebutkan kekuasaan saja melainkan sebagai penghubung atau jembatan antara negara dan masyarakat.

Begitupun dengan masyarakat desa Banjarwati, didaerah ini dari kalangan pemuda sampai dengan yang tua, mereka mempunyai hubungan erat dengan partai-partai politik tertentu, sampai saat ini partai politik yang mampu masuk dan mendapatkan hati di kalangan masyarakat banjarwati sementara hanya partai-partai yang berbasis Agama Islam, seperti PKB, PPP, PAN. Partai nasionalis seperti GERINDRA. Peran Kiai Abdul Ghofur dalam perpolitikan partai Gerindra tidaklah hanya sebagai Kiai panggilan partai atau Kiai sebagai juru kampanye, tapi terlepas dari hal itu Kiai Abdul Ghofur adalah termasuk diantara penggagas berdirinya partai tersebut dan saat ini beliau aktif secara struktural sebagai dewan penasehat pusat partai Gerindra. Secara otomatis sosialisasi partai politik ini kepada masyarakat Banjarwati akan berjalan dengan mulus.

Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 menjadi focus dalam memahami runtuhnya charisma politik Kiai Abdul Ghofur dalam perpolitikan di desa Banjarwati. Adanya dukungan Kiai Abdul Ghofur atas pasangan Gus Ipu-

Mbak Puti sebelumnya diharapkan mampu memenangkan pasangan tersebut, namun demikian sebaliknya, masyarakat desa Banjarwati dengan prinsip pilihan rasionalnya mampu merubah dinamika politik di desa tersebut, adanya kecenderungan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat menjadikan hasil akhir dari pemilihan gubernur dapat dimenangkan oleh pasangan Khofifah-Emil.

Berdasarkan hasil suara perhitungan akhir KPU Kabupaten Lamongan Pemilihan Gubernur Jawa Timur pasangan Gus Ipul-Mbak Puti yang didukung penuh oleh Kiai Abdul Ghofur yang hanya mendapat suara sebanyak 35% dari 67,728.⁷⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁴ <https://infopemilu.kpu.go.id> KPU Kabupaten Lamongan – Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 diakses 07 Desember 2018

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Posisi Kiai Abdul Gofur ditengah Masyarakat Banjarwati

Kiai dalam konteks ini adalah Kiai pesantren yang merupakan pemegang "kuasa" dalam persoalan keagamaan, dimana beliau berposisi dalam hal ini sangatlah terhormat. Melalui posisi tersebut, Kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para santrinya, masyarakat maupun pejabat publik. Dengan potensi ini, tidak jarang sesosok Kiai terlibat bahkan sengaja dilibatkan dalam kontestasi politik hingga penentuan kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan pada masing-masing wilayahnya Kiai tersebut.

Dalam sejarah Indonesia mencatat bahwa ketika diliputi masa- masa kolonial, sosok Kiai tampil selalu eksis di garda terdepan dalam mengobarkan semangat anticolonialisme pada masanya. Seperti KH. Hasyim Asy'ari yang mencetuskan gaung resolusi jihad pada para santrinya yang kemudian menjadi kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.⁷⁵ Begitupun Kiai Abdul Ghofur, beliau terkenal dengan sosok pemimpin yang mempunyai visi yang luas mengenai pondok pesantren Suhan Drajat yang beliau kelola.

⁷⁵ Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) 22 Oktober 1945 telah diakui negara sebagai salah satu peristiwa historis penting bagi indonesia. Melalui Keppres No 22/2015, pemerintah memperingatinya sebagai "Hari Santri untuk mengapresiasi peran pesantren dalam merebut dan mempertahankan NKRI, (Jawa Pos: Minggu, 23 Oktober 2016).

Beliau tidak butuh waktu yang panjang guna mewujudkan visi-visi tersebut, terlihat dari tahun 1972 saat pertama kalinya didirikan ulang pesantren hingga tahun 2019 ini, perkembangan pondok pesantren Sunan Drajat dikatakan bisa berkembang dengan cepat. Dibandingkan dengan pesantren yang terdapat disekitar pesisir utara kabupaten Lamongan.

Kebanyakan pondok yang ada disini bisa dikatan tidak terlalu besar, dilihat dari banyaknya santriwan-santriwati dan sekolah yang ada. Padahal, terdapat pondok pesantren didaerah tersebut yang didirikan jauh lebih terdahulu tetapi pencapaian perkembangannya tertinggal dengan pondok Sunan Drajat. Seperti pondok Tarbiyatut Tholabah yang didirikan tahun 1958 juga pondok Al-Amin yang didirikan tahun 1967. Pondok tersebut berada di sebelah barat tepatnya berada di desa Kranji yang masih dalam satu kecamatan dengan pondok pesantren Sunan Drajat.⁷⁶

Peran Ulama' dalam perpolitikan nasional memang tidak dapat diragukan lagi, sejak zaman penjajahan peran politik ulama sangat besar terlebih saat ini ulama telah menjadi bagian dari peta politik di Indonesia, dan dalam hal ini peran Kiai Abdul pada perpolitikan partai Gerindra tidaklah hanya sekedar sebagai Kiai panggilan partai atau Kiai sebagai juru kampanye, tapi terlepas dari hal itu KH Abdul Ghofur adalah termasuk diantara penggagas berdirinya partai tersebut dan saat ini beliau aktif secara struktural sebagai dewan penasehat pusat Partai Gerindra. Peran Kiai

⁷⁶ Zunath, Ahmad Iwan, Jurnal ummul qura vol x, no. 2, september 2017 1. Strategi kepemimpinan Kiai Abdul Ghofur dalam pengembangan pondok pesantren Sunan Drajat.

tersebut harus dilihat sebagai sesuatu yang menyatukan, yang dalam pengertian harfiahnya agama atau ulama menciptakan suatu ikatan bersama diantara anggota-anggotanya atau pengikut ulama itu sendiri baik dalam urusan ekonomi, sosial dan pilihan politik.⁷⁷ Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali partai politik yang menjadikan Kiai sebagai ujung tombak perluasan masa dengan cara merangkul Kiai dalam agenda politiknya, karena Kiai adalah salah satu aset perolehan suara yang besar karena Kiai adalah termasuk dalam struktur sosial yang utama dalam masyarakat.⁷⁸

Tetapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh Kiai Abdul Ghofur, apa yang dilakukannya sebagai ujung tombak Partai Gerindra tidaklah atas paksaan dan atas pendekatan elit politik Partai Gerindra, tetapi memang sudah ada sejarah panjang antara Gerindra dengan Ponpes Sunan Drajat khususnya Kiai Abdul Ghofur, beliau menyatakan adanya hubungan cita-cita antara keduanya. Setidaknya banyak hal yang menjadi alasan beliau menyatakan dukungan secara terang-terangan terhadap Partai Gerindra tersebut.

Berbicara mengenai arti dari Gerindra yang biasa didengar oleh masyarakat umum adalah Gerakan Indonesia Raya, tapi berbeda halnya dengan pengertian yang dikemukakan oleh beliau, beliau mengatakan bahwa Gerindra adalah Singkatan dari Gerakan Sunan Giri Sunan Drajat yang jika ditelusuri akan ditemukan alasan nama dua walisongo itu

⁷⁷ Elisabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 34.

⁷⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000), h 29.

dicantumkan dalam partai tersebut, Sunan Giri adalah Wali yang terkenal pintar dalam urusan Ekonomi kerakyatan, sedangkan Sunan Drajat adalah termasuk walisongo yang terkenal ahli dalam bidang pemerintahan atau ketata negaraan. Dengan penyatuan dua tokoh dibidang perekonomian dan pemerintahan tersebut diharapkan akan melahirkan seorang pemimpin yang kelak menguasai ilmu dalam bidang pemerintahan dan perekonomian, inilah yang diucapkan Kiai Abdul Ghofur yang mempunyai identitas sosial tinggi di pesantren dan masyarakat sekitar yang menurut Komarudin Hidayat dapat memainkan peran politik yang sangat kuat dimasyarakat sekitarnya.⁷⁹

Setidaknya itulah doktrin atau kisah di balik penamaan partai Gerindra dan definisi itulah yang mendarah daging di kalangan santri ponpes Sunan Drajat maupun kalangan masyarakat desa Banjarwati jika ditanyatentang afiliasi politik KH. Abdul Ghofur sebagai pengasuh pesantren tersebut. Selain aktif dalam dunia politik Kiai Abdul Ghofur juga aktif dalam kegiatan lainnya, hal itu disampaikan oleh Bapak Sutiyono selaku kepala Desa Banjarwati:

*"Kiai Abdul Ghofur niku mboten namung aktif teng dunia politik, namung aktif teng kebudayaan, perbaiki lingkungan, lan peduli teng pemberdaya perekonomian rakyat misale kenaikan taraf hidup tani, pegawai pabrik, miyang, lan pendidikan"*⁸⁰

⁷⁹ Komarudin Hidayat, M. Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama', (Yogyakarta: Jalasutra, h 24.

⁸⁰ Sutiyono, Wawancara, 15 Januari 2019

Bapak sutiyono juga menambahkan:

"Progam perbaikan lingkungan lan pemberdaya perekonomian rakyat engkang ditangani Kini niku mencangkup progam bercocok tanam (obat-obatan, umbi-umbiany. Keefesien ndugi progam niku engkang saget dirasaaken enggeh meniko pohon menggukudu.⁸¹

Kiai Abdul Ghofur juga menjadi pemangku yang membangun beberapa perusahaan yang memproduksi pupuk dolomite, NPK, dan yang bekerjasama dengan konsorium Industri Ponpes Sunan Drajat. Tujuan dari usaha-usaha tersebut adalah sebagai pemberdaya perekonomian warga kurang mampu (menengah kebawah). Dengan didirikannya perusahaan 5/18 dan perindustrian didalam ponpes, otomatis bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan warga bisa meningkat.

B. Analisis Data

1. Perbedaan Pilihan Masyarakat Banjarwati

Secara umum pilihan politik dilihat dari faktor internal dan external.

Dalam faktor internal dapat dilihat dari individu itu sendiri. tingkat intelektual dan keyakinan hati meraka. Sedangkan dari faktor eksternal dilihat dari kehidupan agama, kehidupan sosial, kehidupan politik, serta kehidupan ekonomi. pilihan politik merupakan produk dari perilaku sosial-ekonomi juga merupakan kepentingan golongan suatu masyarakat tersebut.

⁸¹ Sutiyono, Wawancara, 15 Januari 2019

Hasil dari pada penelitian ini banyak hal yang ditemukan, sebagian besar masyarakat adayang kontra dan juga sebagian kecil yang pro, peneliti merasa keadaan ini adalah hal yang wajar, mengingat perbedaan itu adalah bagian dari inti penelitian untuk melihat secara alamiah berbagai dinamika yang ada ditengah masyarakat untuk mencari hasil akhir penelitian ini. Masyarakat Banjarwati hampir belum bisa menerima jika Kiai Abdul Ghofur terjun ke dunia politik praktis, yang dimengerti masyarakat itu bagaimana keseharian beliau adalah bertugassebagai petugas agama, tidak lain dan tidak bukan adalah menyampaikan pesan- pesan agama, pendakwah dan Bapak Pendidikan melalui kepemimpinan spiritualnya, seorang Kiai yang membimbing masyarakatdan santri melalui tasawuf dan tarekat.

Realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan perbedaan pilihan dengan Kiai Abdul Ghofur dalam dunia politik pada pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim 2018 Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Robith Abdillah, menurutnya:

*"Saya itu tetap menghormati apa keputusan dari Kiai, tapi saya juga punya pilihan pribadi dan saya tetap yakin pada pilihan dan harus sama dengan Kiai dan saya tetap takdhim."*⁸²

⁸² Robith Abdillah, Wawancara, 12 Januari 2019

Menurut Anthony Downs, pemilih rasional cuman mengikuti keinginnya diri sendiri di atas kepentingan orang lain (*self interest axiom*).⁸³ Sedangkan dari pendapat yang disampaikan oleh rekan Robith ini, dia menyatakan bahwa jika dengan pilihan politik ini dia kurang setuju terhadap anjuran Kiai yang disampaikan kepada masyarakat luas pada kontestasi pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 kemarin, beda jika konteksnya dengan keagamaan. Robith juga menambahkan bagaimana pandangannya terhadap calon yang didukung oleh Kiai Abdul Ghofur:

"Kalo menurut saya pribadi seperti ini mas, gus Ipul itu kan emang basicnya NU banget begitu juga khofifah, beliau dua duanya sama sama kader terbaik NU, tapi kalo saya pribadi memandang wakilnya gus Ipul itu mbak puti kan bukan asli jawa timur, ada yang merasa nggak cocok aja ketika NU itu diduetkan dengan orang-orang abangan seperti mbak puti itu, kan emang kemarin kan gerindra itu koalisi dengan PDI yang mengeluarkan calon gus Ipul dan mbak puti itu, dan saya kok ngerasa nggak yakin aja, saya lebih cocok ke pasangan bu khofifah dan mas emil, soalnya mas emil ini yang mewakili kaum kaum milenial, cerdas juga, masih muda dan yang penting itu asli jawa timur, pun bu khofifah, sangat keren lah, muslimat banget, dan kemarin juga kan menteri sosial, sedangkan kiprahnya mbak puti ini apa? Kan masih belum jelas, jadi ya nggak ada keyakinan untuk mencoblos kesana, bahkan untuk masyarakat mayoritas

⁸³ Anthony Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie*, engl.: *An Economic Theory of Democracy* 1957 (New York: Tubingen, 1968), hal 26.

rasanya juga begitu, karena mbak puti ini kan bukan orang sini, jadi yo nanti dululah nanti dulu.”⁸⁴

Dari sini bisa dipahami mengapa masyarakat banyak yang berbeda pilihan dengan anjuran yang disampaikan oleh Kiai Abdul Ghofur kepada masyarakat, mereka mempunyai alasan yang bisa dikatakan rasional atas dirinya sendiri dan bentuk dari interpretasi masyarakat desa Banjarwati.

Salah satu penerapa teori pendekatan pilihan rasional (rasional choice) didalam dunia politik yakni guna memaparkan perilaku masyarakat terhadap pemilihan kandidat atau partai didalam pemilihan umum (pemilu). Teori rasional choice lebih tertuju terhadap variasi- variasi pemilihan terhadap suatu kelompok secara psikologis.

Selanjutnya Muhammad Zainal sebagai salah satu tokoh agama desa Banjarwati, menuturkan bahwa:

"Sebagai orang yang dianggap sebagai tokoh agama mas ya, saya mempersilahkan tokoh masyarakat siapa saja yang berinspirasi di desa banjarwati ini, saya bebaskan, saya tidak melarang bagi siapa saja yang mengurus partai politik, terjun di dunia politik praktis, menurut saya ya baik juga, mungkin saja beliau ingin memperbaiki politik di indonesia, memandang bahwa politik yang ada Indonesia sekarang perlu adanya

⁸⁴ Robith Abdillah, Wawancara, 12 Januari 2019

pembenahan. Mungkin dengan beliau masuk di dunia perpolitikan dapat mengubah politik yang ada sekarang."⁸⁵

Dari ulasan diatas, beliau menandakan mendukung Kiai untuk berpolitik, dengan alasan beliau (Kiai Abdul Ghofur) mempunyai gagasan dan tujuan tersendiri untuk mengubah politik praktis ini agar lebih baik kedepannya. Memahami motif politik Kiai yang dijadikan alasan mereka berpolitik memang sulit untuk diterka. Kiai sebagai elite agama biasanya dalam melakukan sebuah tindakan dan keputusan selalu mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan itu bermacam-macam, ada yang bersifat dogmatis yaitu nilai yang bersumber dari pemahaman agama, ada juga sosiologi, bahkan yang bersifat pragmatis sekalipun.

Pada nyatanya didesa tidak semua pemilihan menggunakan teori pemilihan rasional didalam menentukan pilihannya. Pemilih yang masih menggunakan teori pemilihan rasional lebih banyak pada masyarakat yang hidup di pedalaman. Pemilihan rasional bisa dilihat pada tingkatan pendidikan yang ditempuh, juga paham dengan contohnya masyarakat yang tinggal dinegara pesat atau maju, layaknya negara Australia atau negara yang mendapat julukan dengan negara kangguru ini dikenal mempunyai tingkat pendidikan tertinggi daripada negara lainnya, keadaan tersebut bisa dikoreksi pada masyarakatnya yang mempunyai kondisi tidak bisa membaca (buta huruf) yang sangat sedikit.

⁸⁵ Muhammad Zainal, Wawancara, 15 Januari 2019

Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk melakukan segala bentuk tindakan yang dipengaruhi oleh respon yang diterima. Ekspresi kebebasan tersebut terbentuk oleh hasil pikirannya, perasaannya dan prakarsa yang ingin dicapainya. Seperti yang disampaikan Robith, bahwa:

"Kalo saya ya boleh boleh saja, hukumnya mubah, boleh saja kalo menurut saya pribadi, soalnya ya Kiai itu juga harus paham politik biar nggak dibodohi oleh politik gitu, jadi ya santri santrinya pun juga harus diarahkan, diarahkan sesuai koridornya Kiai, tapi yaa tetap seperti itu tidak ada pemaksaan, harus tidak boleh ada pemaksaan kepada santri, untuk menyerukan itu boleh menyeruh untuk memilih ini ini ini itu, tapi kan yo Kiai ghofur ini juga bilang, ee milih satu aja, nggakpapa, nggausah lihat partainya juga, yang dilihat itu orangnya yakan, jadi begitu mas, jadi Kiai ya boleh boleh saja, bahkan bisa wajib, justru haram Kiai nggak paham politik itu, nanti bisa dibodohi oleh politik, kalok yai ghofur ini saya yakin paham banget tentang politik, soalnya sejak tahun 70-80an beliau sudah berkiprah di politik, gitu mus."⁸⁶

Penentuan pilihan rasional didalam pemilihan umum (pemilu) bukan didapat dari ikatan didalam struktural atau ikatan partai yang kuat, tetapi didapat dari penilaian dari warga yang baik, penilaian yan lainnya dapat dilihat dari kepimpinannya dimasa lalu. Apabila hasil kepimpinannya

⁸⁶ Robith Abdillah, Wawancara, 12 Januari 2019

dimasa lalu baik (positif), maka warga memilinya lagi. Namun, jika hasil kepemimpinannya dimasa lalu tidak baik (negatif), maka warga tidak memilinya lagi.⁸⁷ Mengingat Gus Ipul adalah calon incumbent karena beliau menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur menemani Pak Dhe Karwo selama dua periode terakhir.

2. Perspektif Masyarakat Terhadap Anjuran Kiai

Kiai merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dan berkharismatik. Kekharismaan Kiai terletak pada kemantapan tiggah laku dan kualitas hidup yang dimilikinya. Kiai bukan hanya tokoh keagamaan didalam dunia ponpes, tetapi Kiai juga mendapat julukan sebagai elit pesantren yang mempunyai pengaruh tertinggi didalam penyimpinan dan penyebaran ilmu agama.

Hal di atas melatar belakangi masyarakat untuk menjadikan sosok Kiai menjadi suatu kiblat dalam melakukan anjuran hidup sehari-hari.

Dalam konteks politik lebih jauh lagi seorang Kiai mempunyai suatu pandangan politik sebagai anjuran memilih untuk masyarakat. Namun dalam realitanya masyarakat dalam konteks politik ini mempunyai pilihan sendiri dalam memilih. Seperti yang diutarakan salah satu warga desa Banjarwati lainnya yang bernama bapak Prayogo, menurutnya:

"Begini, masalah tentang anjuran Kiai Ghofur itu mas, saya kurang setuju, seharuse Kiai itu fokus kepada penyiaran dakwah saja, ning

⁸⁷ Valdimer O Key, *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting 1936-1960*. (Melbourne: Cambridge University Press, 1966), h. 61.

seharuse seorang Kiai itu tugasnya menjadi pendakwah, Kiai ik: sebagai panutan umat, alangkah baik e seorang Kiai iku tidak ikut-ikutan dalam politik-politikan ngono mas, apalagi sampek dianjurkan memilih salah satu calon, kan masing-masing wong kan bedo pilihan mas, tur duwe pilihane dewe-dewe.”⁸⁸

Dari pendapat yang disampaikan oleh bapak Prayogo ini, dia menyatakan kurang setuju terhadap anjuran Kiai, apalagi seorang Kiai itu ikut serta dalam perpolitikan, dianggapnya kurang enak dipandang. Karena bapak Prayogo menganggap tugas Kiai itu bukan disana, melainkan berharap Kiai lebih fokus untuk menjadi pendakwah, panutan umat dan pendidik anak bangsa.

Menurut Tolhah Hasan, Kiai dilihat dari arti sosiologisnya mempunyai arti Kiai sebagai pemimpin. Dimana kepemimpinannya Kiai dipilah empat bagian diantaranya:

1. *Pertama*, pemimpin ilmiah yang artinya seseorang Kiai memiliki intelektual yang lebih dari warga atau masyarakat pada umumnya.
2. *Kedua*, spiritual yang artinya seorang Kiai memberikan bimbingan kepada warga, santriwan-santriwati dengan mengajarkan bertasawuf dan bertirakat.
3. *Ketiga*, pemimpin sosial.

⁸⁸ Prayogo, Wawancara, 12 Januari 2019

4. *Keempat*, pemimpin administratif yang artinya Kiai bisa beradministrasi dengan baik didalam lembaga seperti ponpes atau aorganisasi yang lain.⁸⁹

Bapak Prayogo masih beranggapan bahwa Kiai Abdul Ghofur ini adalah sosok Kiai yang mempunyai karakteristik sebagai pemimpin spiritual, dimana idealnya pemimpin inilah yang membimbing masyarakat dan santrinya dalam bidang keagamaan melalui tasawuf dan ketarekatannya.

Hal senada juga juga disampaikan oleh aktifis kampung Banjarwati yang tergabung dalam satuan organisasi mahasiswa yang ada di Kampus Institut Pesantren Sunan Drajat saudara Fadhol An Nasro:

*"Kalo menurut saya, hmm apa ya. Kalo menurut saya masih belum bisa diterima oleh akal sehat saya mas, karena marwah Kiai iku kan yo ngandani yo nuturi kemudian cara pandanganya itu adalah dihormati dari sisi kharismatikanya, tapi namanya Kiai itu kan punya nalar pikir atau istilah e ilmu Laduni lah kiro-kirone, itu yang tidak bisa kita nalar, yo iku putusan e Kiai. Lah yo tapi menurut saya iku nggak pantes Kiai kemudian harus terjun ke politik."*⁹⁰

Dari pendapat yang disampaikan oleh saudara Fadhol ini, dia menyampaikan bahwa memang kurang setuju melihat fenomena Kiai yang

⁸⁹ Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002),63.

⁹⁰ Fadhol An Nasro, Wawancara, 12 Januari 2019

terjun dalam dunia politik ini, apalagi seorang Kiai itu ikut serta dalam lokomotif pemenangan calon politiknya, memang saudara fadhhol menganggap Secara individu Kiai mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dinamika politik di Indonesia. Karena beliau juga memang mempunyai untuk memilih dan menyuarakan suaranya. Namun ketika dia mengesampingkan tanggung jawab sebagai tokoh yang punya tanggung jawab sebagai lembaga yang punya lembaga untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat disitulah saudara Fadhol melihatnya kurang etis.

Perspektif masyarakat terkait anjuran Kiai Abdul Ghofur ini dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 kemarin, lanjut Fadhol sebagai berikut:

"Kalau terkait anjuran, "Santri-santri saya harus ikut partai ini ini ini, harus nyoblos ini ini ini, iku maksud ku kenopo Kiai kok gak oleh nang partai ikut-ikut campur partai, akhirnya itu kan akan ditumpangi kepentingan-kepentingan koyok ngono iku sehingga seng jenenge kharisma Kiai iku mau mulai luntur-mulai luntur sehingga kepercayaan masyarakat iku yo mulai luntur. Kalau boleh saya terus terang ya mas Robeth, di daerah Banjarwati khususnya kecamatan Paciran iku akeh seng gak patek o seneng karo Kiai Ghofur dalam sisi politiknya seperti kemarin itu mas, maaf mas yo sakdurunge."⁹¹

⁹¹ Fadhol An Nasro, Wawancara, 12 Januari 2019

Dari statemen tambahan yang ditambahkan oleh mas Fadhol ini, dia menyampaikan bahwa dengan anjuran untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil kemarin sangat beresiko, efek sosial yang sangat panjang nantinya akan terjadi kepada sosok kekiyaiannya Kiai Abdul Ghofur ini. Lebih baik Kiai melaksanakan kegiatannya sebagai pemimpin umat, petugas agama selayaknya masyarakat memandang Kiai ini memang benar-benar Kiai yang bisa dianut dan dijadikan sebagai imam bagi agamanya.

Peran Kiai sebagaimana yang telah dituturkan oleh Yahya Aziz, Kiai sebagai pemimpin agama secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh terhadap santri dan masyarakat sekitar. Sebagai salah satu posisi penting pemersatu umat, umumnya seorang Kiai akan menjadi salah satu target partai politik untuk mendongkrak suara partai sebanyak-banyaknya, karena apa yang difatwakan oleh seorang Kiai ini terbukti mudah untuk mengumpulkan basis suara daripada harus berkampanye kesana dan kesini. Tidak sedikit orang-orang partai politik menjadikan Kiai sebagai ujung tombak perluasan massa dengan cara menjadikan Kiai ini sebagai icon dalam agenda politiknya, karena Kiai adalah salah satu aset perolehan suara yang besar karena Kiai adalah termasuk dalam struktur sosial yang utama dalam masyarakat."⁹²

⁹² Dan mmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000), 29.

Selanjutnya peneliti melanjutkan perjalanan untuk menggali data kepada masyarakat Banjarwati yang lain, mas Muhammad Choirul Warga desa Banjaranyar Rt 03 menjelaskan:

"Nek karektere abah yai niku, abah yai siap melarat demi kepentingat umat mas, terus abah yai nggeh sabar, lebih mementingkan santrinya daripada beliau piyambak, yang pasti abah yai itu sosok sang pendidik, trah e abah yai itu loman.

kalau masalah abah yai ikut politik itu, abah yai di situ cuma ingin negoro, niki saene pripun. Abahyai disitu cuma sebagai penasehat kalau masalah abah yai mewajibkan memilih salah satu calon gubernur kala itu, mungkin abah yai sendiri tau mana yg lebih bisa memimpin dan meminta masyarakat untuk memilihnya, mungkin juga abah yai disitu menginginkan masyarakat mempunyai pemimping dari golongan seorang Kiai atau ulama, niku menurut saya."⁹³

Dari pendapat mas Muhammad Choirul ini dia lebih kepada penyampaian karakter Kiai Abdul Ghofur yang memang menyetujui jika Kiai ini terjun dalam memilih untuk ke politik, dengan pertimbangan yang rasional dan keinginan yang realistis, yakni menginginkan pemimpin politik dari golongan orang-orang Kiai karena masyarakat butuh sosok yang paham tentang keagamaan yang melebihinya.

⁹³ Muhammad Choirul, Wawancara, 12 Januari 2019

Ada pula tanggapan masyarakat yang kurang mendukung dengan Kiai Abdul Ghofur jika berpolitik, salah satunya yang dijelaskan oleh anak muda yaitu ketua Karang taruna Ahmad Maushul, dia mengatakan bahwa:

*"Kalo menurutku iku nggak cocok e dari apa ya, bidangnya mas, jadi bidangnya itu sendiri-sendirilah, lah maksudnya sendiri-sendiri itu untuk Abah Yai Ghofur luwih apik fokus nang masyarakat, ngasih wejangan-wejangan terkait pendidikan politik, apa itu politik dan lainnya, nah yang menerima wejangan adalah masyarakat sekitar beliau di desa banjarwati itu, karena nanti masyarakat bisa memilih dan memilah perkataan dan perbuatan Abah Yai Ghofur tersebut."*⁹⁴

Dia menyampaikan pendapatnya jika kurang setuju jika Kiai terjun didunia politik. Karena dikhawatirkan lupa dengan tugas-tugasnya yang

menjadi panutan warga dan santri disekitarnya, dia menambahkan:

*"Untuk Anjurannya sih bagiku tidak terlalu menonjol. melihat Abah Yai ini kan Cuma menyerukan, tidak terjun secara langsung beliaunya itu mas, tapi beliau juga bisa dikatakan sebagai tokoh yang berperan di desa banjarwati."*⁹⁵

⁹⁴ Ahmad Maushul, Wawancara, 15 Januari 2019

⁹⁵ Ibid, 15 Januari 2019

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya Seorang Kiai itu sebaiknya cukup menjadi pembina atau pembimbing bagi santri dan masyarakatnya, dan tidak terjun didalam dunia politik.

Kiai Ach. Dhofir Zuhri mendefinisikan Kiai sebagai sebuah status sosial dalam kehidupan sosio-kemasyarakatan untuk seorang ulama.⁹⁶ Namun beliau tidak membedakan tipologi gerakan Kiai sebagaimana Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan Endang Turmudi yang memberikan penamaan terhadap Kiai yang disesuaikan dengan tipologi gerakannya. Dalam karyanya yang berjudul peradaban sarung Kiai Ach. Dhofir Zuhri berusaha melakukan desaklarisasi terhadap peran Kiai dalam panggung politik. Beliau mencita-citakan agar para Kiai fokus untuk menjadi pribadi sebagaimana pribadi yang digambarkan oleh Sayyid Abdullah Bin Alawi Al Hadad dalam kitabnya yang berjudul An-Nashaihud Diniyyah.

3. Desakralisasi Politik Kiai Dalam Masyarakat Banjarwati

Desakralisasi merupakan proses sosial guna melepaskan status religi dari isu kekonflikan agama. Menurut Svensson desakralisasi adalah guna menurunkan sifat religius dan menomor satukan rasional didalam suatu konflik.⁹⁷

Islam merupakan agama yang mempunyai tokoh keagamaan yang diyakini kesakralanya karena Kiai menjadi tokoh agama yang

⁹⁶ *bid.*, h. 126

⁹⁷ Andrias Lopian, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya. (Jurnal E Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya)

dinomersatukan. Warga berkeyakinan bahwa Kiai mempunyai sifat sakral karena ritual-ritual yang dilakukan dan sikap kebajikannya.

Kesakralan Kiai ini sebelumnya juga terjadi pada Kiai Abdul Ghofur yang memiliki kharisma dalam perannya. Max Webber mengartikan Kharisma adalah sikap atau perilaku khusus seorang yang bisa menciptakan ketertarikan orang lain kepada mereka.⁹⁸

Namun kesakralan Kiai Abdul Ghofur ini mulai menurun ketika beliau melibatkan dirinya dalam dunia politik praktis pada pertarungan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 kemarin. Dalam perpolitikan di Keterlibatan Kiai dalam politik praktis memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Banyak yang berkomentar bahwasannya Kiai cukup menjadi panutan umat agama islam, dan menjauhkan dirinya terjun dalam dunia perpolitikan.⁹⁹

Demikian kesakralan Kiai Abdul Ghofur dan peranannya dalam dunia politik praktis menimbulkan argumentatif masyarakat Desa Banjarwati perihal keikutsertaannya dalam pilihan politik sesuai dengan anjuran Kiai Abdul Ghofur. Argumen yang dilontarkan masyarakat desa Banjarwati adalah, pertama, masyarakat berhak dalam membangun desanya sendiri, maka kedua, masyarakat juga berhak menentukan pilihan politiknya, dalam hal ini, pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

⁹⁸ Andrias Hibert Lopian Representasi Desakralisasi Tokoh Agama Katolik Dalam Film "Vatican Tapes" Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

⁹⁹ Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Kiai dan Politik, (UIN Malang Press, 2007)

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Riyadlus Sholihin, sebagai Sekretaris desa Banjarwati:

*"Hari ini masyarakat kita sudah lebih cerdas dalam hal menentukan pilihan dek, didalam satu desa ini tidak hanya satu dua saja orang yang dianggap sebagai panutan dalam konteks ini, artinya, masyarakat memiliki imam (ustadz) sendiri-sendiri, dan masing-ma pro juga ada yang kontra dengan beliau Kiai Abdul Ghofur."*¹⁰⁰

Bapak Riyadlus Sholihin juga menambahkan:

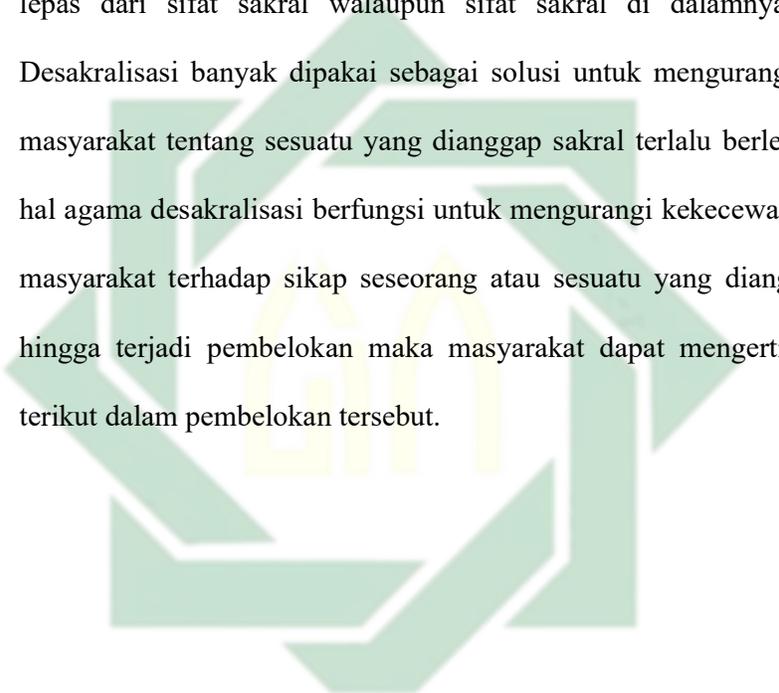
*"Yaa kalo soal pilihan kan urusan pribadi masing-masing ya mas, Kiai Abdul Ghofur ini memang sesosok yang berpengaruh mas, masyarakat desa Banjarwati disini basis masa NU di ibu-ibu fatayat juga banyak, pastine de'e duwe piliane dewe dewe."*¹⁰¹

Dari dua statemen yang dilontarkan oleh narasumber peneliti ini bisa kesimpulan arah daripada pembicaraan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat desa Banjarwati masih menganggap Kiai Abdul Ghofur ini sebagai tokoh Agama yang masih berpengaruh, namun terkait anjurannya untuk memilih ini yang beda pandangan dengan warga masih banyak diperbincangkan.

¹⁰⁰ Riyadlus Sholihin, Wawancara, 15 Januari 2019

¹⁰¹ bid, Wawancara, 15 Januari 2019

Maka Desakralisasi Kiai dalam masyarakat Desa Banjarwati ini mencoba untuk mengungkapkan nilai yang dianggap turun dari sakral agama Islam dan lebih bersifat ke arah provokatif. Desakralisasi tidak bisa lepas dari sifat sakral walaupun sifat sakral di dalamnya memudar. Desakralisasi banyak dipakai sebagai solusi untuk mengurangi sifat dari masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sakral terlalu berlebih. Dalam hal agama desakralisasi berfungsi untuk mengurangi kekecewaan terhadap masyarakat terhadap sikap seseorang atau sesuatu yang dianggap sakral hingga terjadi pembelokan maka masyarakat dapat mengerti dan tidak terikut dalam pembelokan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karena masyarakat di Desa Banjarwati cenderung memiliki pola pikir sesuai kesadaran mereka masing-masing, seperti hasil data yang terungkap bahwa masyarakat tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada seorang Kiai, mereka tetap berlandaskan asas pilihan rasionalnya untuk menentukan calon pemimpin di Jawa Timur tahun 2018.
2. Perspektif masyarakat terhadap anjuran Kiai dalam menentukan pilihan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur 2018 adalah mereka tetap memilih sesuai dengan pendiriannya dan hati Nurani mereka masing-masing. Namun, mereka tetap menghormati anjuran Kiai, dan tidak melakukan tindakan yang dapat melecehkan atau membully Kiai dan juga tidak membanding-bandingkan Kiai yang mendukung Paslon yang berbeda,

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pembaca, penulis sadarai bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca bisa memberi saran dan kritikan yang membangun.
2. Penulis juga berharap pada adik tingkat bisa mengembangkan tulisan didalam skripsi ini atau ingin melakukan penelitian, mengkaji lebih luas

tentang fenomena Desakralisasi Kiai dalam Pilkada (studi di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), serta apabila ingin melakukan penelitian yang sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A. Partanto Pius, 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Abdul Munir Mulkan, 1992. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Rinneka SIPRESS.
- Abdus Salam, 2015. *Pengantar Sosiologi*. Malang: Dresm Lentera Buana.
- Ach. Dhofir Zuhri, 2018. *Peradaban Sarung*. Jakarta: Gramedia
- Anwar Arifin, 2011. *Komunikasi politik. (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bisri, A. Mustofa, 2003. *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan*. Rembang : Lembaga Informasi dan Studi Islam (L” Islam) Yayasan Ma’had as-Salafiyah.
- Cholisin, dkk, 2007. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT: Raja Grafindo.
- C.S.T. Kansil, 1986. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dan Nimmo, 1993. *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, terj. Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dan Nimmo, 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Doyle p. Johnson, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elisabeth K. Nottingham, 2002. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Endang Turmudi, 2003. *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Fathurin Zen, 2004. *NU Politik*. Yogyakarta: elkis
- Hafied Changara, 2007. *Pengantar ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamdan Rasyid, 2007. *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husaini, Adian dan Abdurrahman al-Baghdadi, 2007. *Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Kathur Suhardi dan Madarijus Salikin, 2006. *Terjemahan Buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (Pendakian Menuju Allah) Penjabaran Kongkret "Iyyaka Na' Na' budu waiyyaka Nasta'in"*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Koentjoroningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Komarudin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, 2004. *Manuver Politik Ulama'*. Yogyakarta: Jalasutra.
- L. Daniel Pals, 2012. *Seven Theories of Religion*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Lubis Saiful Akhyar, 2007. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta, eLSAQ Press.
- Masyur Semma, 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia dan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.

- Michael Rush dan Philip Althoff, 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiarjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Azhar, 1997. *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: rajawali Press.
- Nina Winangsih Syam, 2002. *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*. Bandung: Unpad.
- Nurcholish Madjid, 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina
- Nurhayati Djamas, 2008. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT.
- Nurudin, 2005. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Onong Uchyana Effendi, 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. H. imam Suprayogo, 2009. *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*. UIN Malang Press.
- Ramlan Surbakti, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Ramlan Surbakti, 2008. *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi Perencanaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*. Kemitraan Jakarta.

Ritzer George dan Douglas J. Goodman, 2011. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Rulam Ahmadi, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rochmat Harun dan Sumarno, 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Bandar Maju.

S. Sumarsono, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utsman Abdul Mu'iz, 2000. *Tarbiyah Siyasah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Inter Media.

Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal:

Agus Hadiawan *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol. 3 No. 7 Desember 2009.

Eko Setiawan, *Keterlibatan Kyai Dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat*. Alumnus Program Pascasarjana Sosiologi universitas Brawijaya Malang. Jurnal Ilmiah. Oktober 2017.

H. Sadi, "*Khazanah Pendidikan*". Jurnal Ilmiah Kependidikan vol. X, No. 1, September 2016.

H. Sadi, *Kyai dan Politik: Mengintip Motif Kyai NU (Nahdlatul Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Kependidikan Khazanah Pendidikan, Vol. X, No. 1, September 2016.

Internet :

Hasil Perhitungan Pilgub Jatim 2018. Diakses dari <https://infopemilu.kpu.go.id>

Pengertian Masyarakat dalam Pandangan Ahli, diakses dari <http://jurnal.com/2013/12/pengertian-masyarakat-dalam-pandangan-ahli>

Pengertian Teori Pilihan Rasional, diakses dari <http://bluean9.e;wordpress.com/2011/11/22/rational-choice-theory-teori-pilihanrasional>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A